

# REVIEW JUKNIS PENERBITAN TERJEMAH AL-QURAN BAHASA DAERAH

Nurrahmah

Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

[rahmahuseinkemenag@gmail.com](mailto:rahmahuseinkemenag@gmail.com)

## *Executive Summary*

Policy Brief ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa masalah penerbitan terjemah al-quran bahasa daerah oleh pihak swasta untuk tujuan komersial atau lainnya. Sejauh ini, Puslitbang LKKMO belum pernah memberikan izin bagi pihak swasta untuk ikut serta menerbitkan al-quran terjemah bahasa daerah, padahal banyak pihak swasta yg menginginkannya. Di sisi lain, Puslitbang LKKMO memiliki keterbatasan anggaran dalam penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah dan belum memiliki regulasi atau payung hukum untuk mengikutsertakan pihak swasta dalam penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah dan menayangkannya di platform digital. Puslitbang LKKMO sudah memiliki juknis penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah namun belum memuat keterlibatan swasta untuk tujuan komersial atau lainnya. Maka, alternatif solusi yang kami tawarkan adalah mereview juknis penerbitan terjemah al-quran bahasa daerah agar bisa memuat pasal-pasal yang mengatur keterlibatan pihak swasta dalam penerbitan baik untuk kepentingan komersil atau lainnya.

## A. Pendahuluan

Al-quran terjemah bahasa daerah merupakan ikhtiar Kementerian Agama dalam memberikan layanan keagamaan bagi pemeluk agama sesuai dengan misinya meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 yang salah satu unsurnya adalah bahasa local/daerah. Dengan adanya penerjemahan al-quran bahasa daerah, diharapkan dapat mendekatkan masyarakat kepada kitab sucinya sekaligus menjaga bahasa daerah dari potensi kepunahan. Agar terjemahan al-quran bahasa daerah dibaca dan dimanfaatkan bagi umat Islam, maka al-quran terjemah tersebut dicetak dan sebarluaskan kepada masyarakat pengguna.

Puslitbang LKKMO sudah berhasil mencetak sebanyak 24 al-quran terjemah bahasa daerah dan mendapat sambutan yang besar dari Masyarakat. hanya saja karena keterbatasan anggaran, maka cetak fisik al-quran terjemah bahasa daerah belum bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat. Di saat-saat seperti ini, ada pihak-pihak lain (swasta) yang ingin ikut serta mencetak dan menayangkannya dalam platform digital. Di satu sisi, hal ini menguntungkan dan membantu Puslitbang LKKMO dalam menyebarkan al-quran terjemah bahasa daerah kepada Masyarakat. namun di sisi lain, juknis penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah belum memuat aturan tersebut. Artinya Puslitbang LKKMO sebagai pemegang hak cipta al-quran terjemah bahasa daerah belum memiliki payung hukum untuk memberikan izin tersebut kepada swasta dan ada kekhawatiran jika itu disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Policy brief ini mengangkat isu mengenai pentingnya melakukan review terhadap juknis penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah dan mengusulkan alternatif Solusi atas persoalan tersebut.

## B. Deskripsi Masalah

Masalah penerbitan al-quran bahasa daerah oleh pihak swasta, menjadi persoalan yang cukup krusial. Sejak beberapa tahun terakhir, Puslitbang LKKMO setidaknya sudah 3 kali menghadapi persoalan tersebut. Pertama, ketika al-quran terjemah bahasa daerah diunduh tanpa izin oleh salah satu parpol di Indonesia pada tahun 2015-an. Pada saat itu, al-quran terjemah bahasa daerah milik Puslitbang LKKMO masuk dalam big data parpol tersebut. Kedua, munculnya perpustakaan Islam di jagad Maya yang bernama “Islamika” tahun 2024 yang didalamnya memuat al-quran terjemah bahasa daerah milik Puslitbang LKKMO yang diunduh tanpa izin kepada Puslitbang LKKMO sebagai pemegang hak cipta. Ketiga, beberapa pihak swasta yang mengajukan pertanyaan dan permohonan untuk mencetak al-quran terjemah bahasa daerah untuk diperjualbelikan secara bebas.

Permasalahan di atas, belum dapat diatasi karena juknis penerbitan al-quran bahasa daerah Puslitbang LKKMO belum memuat aturan penerbitan oleh pihak swasta, khususnya untuk tujuan komersial. Juknis tersebut juga memuat aturan yang terlalu kaku dan terlalu panjang alurnya, sehingga agak menyulitkan pihak yang mengajukan.

Oleh sebab itu, menjadi satu hal yang penting untuk melakukan review terhadap juknis penerbitan al-quran bahasa daerah dan membuat peraturan tentang prosedur dan tatakelola penerbitan. Dengan menggunakan tehnik analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA), maka dapat disimpulkan bahwa akar masalah ini adalah tidak adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur masalah penerbitan al-quran bahasa daerah oleh pihak swasta untuk kepentingan tertentu.

## C. Rekomendasi

REKOMENDASI	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI
Melakukan tinjauan ulang terhadap juknis penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah	Menambah pasal-pasal yang terkait dengan mekanisme izin pihak swasta kepada Puslitbang LKKMO	Mereview juknis penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah
Membuat regulasi penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah	Menyusun peraturan Penerbitan Al-Quran Terjemah Bahasa Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat tim penyusun peraturan penerbitan</li><li>2. Menyusun agenda</li><li>3. Menetapkan desain</li></ol>

## D. Penutup

Permasalahan belum adanya peraturan tentang penerbitan al-quran terjemah bahasa daerah oleh pihak swasta apabila tidak ditindaklanjuti dengan lahirnya regulasi yang mengatur tentang tatakelola penerbitan, akan berdampak serius bagi Puslitbang LKKMO, diantaranya adalah penyalahgunaan produk-produk LKKMO oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan tertentu.